



SUMBER BERITA

JUMAT, 19 JULI 2019

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Inspektorat Audit Desa Taba Kelintang

ARGA MAKMUR, BE - Indikasi korupsi yang terjadi di Desa Taba Kelintang Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara (BU) spertinya akan terus berlanjut.

Pasalnya, laporan masyarakat yang masuk ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) BU sudah diteruskan ke Inspektorat Kabupaten BU. Inspektorat BU sebagai APIP diminta pihak penyidik untuk melakukan audit terhadap pengelolaan Dana Desa dan ADD di desa Taba Kelintang tersebut.

Kepala Inspektorat BU, Ir Suharto mengaku pihaknya sudah menerima surat dari Kejari BU untuk melakukan audit atas pengelolaan Dana Desa (DD) dan ADD di Desa Taba Kelintang. "Iya, kita sudah menerima surat dari pihak Kejari BU, untuk melakukan audit dan saat ini, pihaknya telah mempersiapkan tim untuk terjun ke lapangan, dan masih dalam proses," kata Suharto.

Untuk diketahui, indikasi korupsi yang terjadi atas pengeloaan DD dan ADD di Desa Taba Kelintang, yang paling mencolok terjadi pada kegiatan pembuatan toilet sebanyak 107 unit, dengan biaya setiap unitnya sebesar Rp. 4.750.000.

Ironisnya, informasi yang terhimpun,

sebanyak 61 Kepala Keluarga (KK) penerima pembuatan WC yang bersumber dari ADD dan DD di Desa Taba Kelintang, ternyata ada indikasi unsur paksaan yang dilakukan oleh Kades terhadap warganya, untuk menandatangani kuitansi kosong, yang nilai uangnya tidak sesuai yang mereka terima. Menurut keterangan salah seorang warga Desa Taba Kelintang Jonadi, hasil musyawarah yang dipimpin Ketua BPD pada tanggal 28 September tahun 2018 lalu agar pembuatan WC 107 di setiap KK dikerjakan sesuai dengan RAB dengan besaran biaya senilai Rp. 4.750.000 per satu unit WC dengan total anggaran sebesar Rp. 536.284.000. Namun pada kenyataannya, warga desa hanya menerima uang senilai Rp. 3 juta. Itupun diatas kuitansi kosong yang disertai surat pernyataan, yang telah dibuat oleh Kades bersama bendahara desa.

"Waktu itu kami dipanggil oleh Bendahara Desa, agar datang ke rumah pribadinya. Namun sampai di rumahnya itu, bendahara desa langsung bilang ini perintah kades, tolong tanda tangani kuitansi kosong beserta surat pernyataan yang telah mereka buat. Setelah usai tanda tangan, kami langsung

diberikan uang senilai Rp 3 Juta," terang Jonaidi. Selain itu, informasi terbaru terkait warga menyampaikan surat laporan dugaan korupsi ADD dan DD di Desa Taba Kelintang pada tanggal 9 Juli tahun 2019 lalu.

Akhir-akhir ini ketua BPD desa setempat, sempat mengklaim laporan warga ke Kejari BU soal pembangunan WC tidak sesuai dengan fakta. "Kami sempat kaget, kok secara tiba-tiba akhir-akhir ini Ketua BPD mengklaim laporan warga soal pembuatan WC. Padahal, pada waktu itu ketua BPD sendiri yang mengajak warga mengadakan musyawarah untuk mendesak Kades, agar pembangunan WC di kerjakan sesuai dengan RAB dan anggaran yang sudah ditentukan," ungkapnya.

Dengan adanya hal ini, warga berharap agar pihak aparat penegak hukum mengusut tuntas terkait persoalan ini. Begitu pula masalah kades, yang telah menjual Besi jembatan yang menjadi aset desa Taba Kelintang tempo lalu. "Meskipun telah dilaporkan ke kejaksaan, tapi kalau kami lihat Kades saat ini santai-santai aja. Namun, kami yakin pihak Kejari BU akan memproses laporan warga itu," tandasnya. (127)